

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI QR MONEY DALAM MENINGKATKAN TATA KELOLA USAHA DI BUMDES BINA BERSAMA

Rio Priantama<sup>1</sup>, Tito Sugiharto<sup>2</sup>, Yulyanto<sup>3</sup>).

<sup>1</sup> Teknik Informatika, Universitas Kuningan

<sup>2</sup> Teknik Informatika, Universitas Kuningan

<sup>3</sup> Desain Komunikasi Visual, Universitas Kuningan

email: <sup>1</sup> [rio.priantama@uniku.ac.id](mailto:rio.priantama@uniku.ac.id), <sup>2</sup> [tito@uniku.ac.id](mailto:tito@uniku.ac.id), <sup>3</sup> [yulyanto@uniku.ac.id](mailto:yulyanto@uniku.ac.id)

### ABSTRACT

*BUMDes as a supporter of village economic resilience has been rolled out and regulated in various laws and regulations, such as Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia No. 4 of 2015 concerning Establishment, Management and Management, and dissolution of Village-Owned Enterprises and as well as No. 22 of 2015 2016 concerning Setting Priorities for the Use of Village Funds for 2017. BUMDes Bina Bersama Desa Bojongnegara has problems facing, namely discrepancies between reports and activity implementation, disbursement of funds that are not supported by evidence, and verification of reports is not carried out every month, an indication that financial management has not been running properly. both as well as the use of physical money as a transaction provides an opportunity for leakage of funds. One alternative solution as an effort to overcome this problem is to utilize QR Money technology in business management at BUMDes Bina Bersama, Bojongnegara Village, Ciledug District, Cirebon Regency. This community service aims to provide an understanding of the use of information technology, especially QR Money as a financial management mechanism for various sources of income. After the activities were carried out, knowledge and skills increased by around 58.8% from 28.7% to 87.5%, and every transaction at BUMDes Bina Bersama has used QR Money.*

**Keywords:** QR Technology, BUMDES, Training, Finance, Governance

### ABSTRAK

*BUMDes sebagai penyokong ketahanan ekonomi desa telah digulirkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta serta No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. BUMDes Bina Bersama Desa Bojongnegara memiliki masalah yang dihadapi yaitu ketidaksesuaian antara laporan dengan pelaksanaan aktivitas, pencairan dana yang tidak didukung bukti, dan verifikasi laporan tidak dilakukan setiap bulan, menjadi indikasi tata kelola keuangan belum berjalan dengan baik serta penggunaan uang fisik sebagai dalam transaksi memberikan celah kebocoran dana. Salah satu solusi alternative sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah memanfaatkan teknologi QR Money dalam tata kelola usaha di BUMDes Bina Bersama Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pemanfaatan teknologi informasi khususnya QR Money sebagai salah satu mekanisme pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan. Setelah dilakukan kegiatan, Pengetahuan dan keterampilan meningkat sekitar 58,8% dari 28,7% menjadi 87,5%, serta Setiap transaksi di BUMDes Bina Bersama telah menggunakan QR Money*

**Kata kunci :** Teknologi QR, BUMDES, Pelatihan, Tata Kelola, Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang ada di tingkat desa dengan kepemilikan modal desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes berperan sebagai kekuatan yang mampu mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui produktivitas ekonomi desa dengan berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, serta peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar pendirian BUMDes, belum mampu membawa sebagian besar BUMDes untuk beroperasi secara optimal dalam pemenuhan target sehingga upaya yang memadai untuk mendampingi pengembangan BUMDes mutlak dilakukan.

Beberapa studi telah dilakukan berkaitan masalah-masalah yang dihadapi BUMDes, diantaranya penelitian [1] menyatakan bahwa komunikasi antara BUMDes dengan pemerintah dan masyarakat desa, serta transparansi dan akuntabilitas menjadi permasalahan utama yang dihadapi BUMDes. Secara lebih terperinci, penelitian [2] menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan pelaksanaan aktivitas, pencairan dana yang tidak didukung bukti, dan verifikasi laporan tidak dilakukan setiap bulan, yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas masih relatif belum berjalan dengan baik.

Sejatinya BUMDes diharapkan sebagai kekuatan yang dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa. Namun keterbatasan pengetahuan pengurus BUMDes serta masyarakat terhadap aspek-aspek tata kelola BUMDes: *Transparansi, Akuntabel, Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Sustainabel*, [3], juga belum memahami penerapan teknologi terkini dalam pengembangan BUMDes, berdampak pada

melambatnya perkembangan dan pencapaian target BUMDes

BUMDes Bina Bersama yang didirikan atas inisiasi warga dan Karang Taruna Desa Bojongengara, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, memiliki cita-cita dan target yang sama sebagaimana diamanahkan oleh peraturan Kementerian Desa. Sesuai dengan perkembangan kewilayahan dengan berdirinya pabrik-pabrik di sekitar wilayah desa Bojongnegara, maka diversifikasi bidang usaha BUMDes Bina Bersama yang awalnya hanya melakukan pemasaran produk olahan desa, berkembang dengan menambah bidang usaha menjadi Tata Kelola Parkir (Jasa Parkir) dan Warung Serba Ada (Waserda) untuk mengakomodir kebutuhan karyawan pabrik dan masyarakat umum.

Namun demikian, berkembangnya jenis usaha yang dilakukan BUMDes tidak serta merta memberikan efek percepatan terhadap perkembangannya. Pengetahuan dan keterampilan tata kelola keuangan dan sumber pendapatan serta minimnya literasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target. Pemasukan dan pengeluaran dalam setiap transaksi tidak tercatat secara satu pintu sehingga kerap terjadi tindakan penggelapan pemasukan dana dan atau penggelembungan biaya pengeluaran. Dalam usaha tata kelola parkir, jumlah pemasukan yang tidak sesuai dengan laporan harian jumlah kendaraan yang parkir, menjadi indikator bahwa transaksi yang masih menggunakan “*fresh money*”, memiliki celah kebocoran pendapatan dalam aliran kas BUMDes. Begitu pula bidang usaha Waserda yang masih belum efektif dan efisien tata kelolanya karena masih memiliki celah-celah kelemahan yang antara lain ketidaksesuaian antara jumlah restribusi dengan dana yang menjadi pemasukan

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan aparat desa Bojongnegara, Pengurus BUMDes Bina Bersama serta masyarakat desa Bojongnegara, fokus permasalahan yang membutuhkan solusi adalah 1) bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tata kelola keuangan bagi pengurus dan anggota BUMDes Bina Bersama; 2) jenis

teknologi apa yang dapat menutup celah kebocoran pendapatan dalam bisnis proses BUMDes; 3) bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota BUMDes dalam pemanfaatan teknologi yang dipilih.

Kegiatan pengabdian ini, selain bertujuan untuk mendeseminasikan penerapan dan pemanfaatan Teknologi QR Money dalam tata kelola usaha BUMDes sebagai hasil penelitian sebelumnya, juga memiliki relevansi dengan upaya pemerintah dalam **SDGs**, terkait **Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan inovasi desa (SDGs 8-10)** dengan melakukan **inisiasi pengembangan BUMDes**. Sebagaimana dalam [4], Teknologi QR Code pun tidak luput dari celah keamanan data ketika teknologi tersebut diaplikasikan dalam sebuah proses bisnis. Sehingga deseminasi secara komprehensif dalam pemanfaatan teknologi QR menjadi sebuah proses yang sangat penting. Berdasarkan penelitian [5], menyatakan bahwa penerapan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dapat diterima oleh masyarakat sebagai teknologi untuk metode pembayaran non tunai. Sementara dari hasil survey kepada masyarakat dan FGD dengan pengurus

BUMDes, masyarakat secara umum belum memahami penerapan Teknologi QR Money dalam transaksi keuangan. Oleh sebab itu, pelatihan dan pendampingan ini sangat berguna bagi BUMDes Bina Bersama dan masyarakat umumnya.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Perkembangan jenis usaha yang dilakukan BUMDes tidak serta merta memberikan efek percepatan terhadap perkembangannya. Beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain:

1. Minimnya literasi pengetahuan dan keterampilan tata kelola keuangan dan sumber pendapatan
2. Minimnya literasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan
3. Transaksi yang masih menggunakan “*fresh money*”, memiliki celah kebocoran pendapatan dalam aliran kas BUMDes.

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, tim pengabdian bersama BUMDes Bina Bersama Bojongnegara merumuskan bersama solusi dari setiap permasalahan yang ada sebagaimana dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Solusi dan Target Luaran

No	Lingkup Masalah	Solusi Yang Ditawarkan	Target Luaran
1	Pengetahuan dan Keterampilan Tata Kelola Keuangan Pengurus dan Anggota BUMDes	Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan Tata Kelola Keuangan berbasis Teknologi Informasi	Pengurus dan Anggota BUMDes memahami dan terampil dalam tata kelola keuangan berbasis Teknologi
2	Teknologi yang dapat menutup celah kebocoran pendapatan dalam bisnis proses BUMDes	Melaksanakan Focus Group Discussion menentukan teknologi QR Money	Menetapkan Teknologi QR Money sebagai basis utama transaksi keuangan di BUMDes
3	Pengetahuan dan Keterampilan Pemanfaatan Teknologi Terpilih Pengurus dan Anggota BUMDes	Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan Teknologi QR Money sebagai basis utama transaksi pada BUMDes	Pengurus dan Anggota BUMDes memahami dan terampil menggunakan QR Money dalam transaksi

### 3. METODELOGI PELAKSANAAN

#### 1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilakukan di kantor BUMDes Bina Bersama Desa Bojongnegara, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Sementara kegiatan Simulasi dilakukan di area parkir PT. KGC yang menjadi salah satu bidang usaha BUMDes Bina Bersama

#### 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdian yang terdiri dari 3 orang dosen dan 5 orang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan.

Kegiatan diawali dengan *Focus Group Discussion* (FGD) antara tim pengabdian dengan ketua dan pengurus BUMDes Bina Bersama untuk mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan serta waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan simulasi.



**Gambar 1** FGD bersama BUMDes Bina Bersama

#### 3. Metode Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan melalui beberapa tahap meliputi:

- a. Tahap Persiapan berupa survey awal, penentuan lokasi sasaran, penyusunan materi pelatihan

- b. Tahap Pelaksanaan berupa penjelasan pemanfaatan teknologi QR Money di lingkungan BUMDes melalui Metode Ceramah dan Tanya Jawab serta upaya meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota BUMDes dalam teknologi QR Money melalui Metode Simulasi dan Tanya Jawab
- c. Tahap Evaluasi Hasil berupa pengukuran kinerja sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan PKM menggunakan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dalam menganalisis hasil dari metode Tanya Jawab sementara analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur hasil kuesioner yang disebar setelah melakukan metode Simulasi. Secara garis besar dapat digambarkan dalam Gambar 2



**Gambar 2** Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemilihan alat ukur yang digunakan untuk menentukan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan setelah dilakukan kegiatan, dibangun berdasarkan Indikator Tata Kelola BUMDes sebagaimana dalam Tabel 2 berikut:



**Tabel 2** Indikator Tata Kelola BUMDes

Aspek	Indikator	Deskripsi Indikator
<b>Transparansi</b>	T5 : Mekanisma pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan	Pengurus BUMDes dapat menggunakan QR Money untuk mengelola transaksi-transaksi seluruh bidang usaha
	T11 : Mekanisma pertanggungjawaban pengelola BUMDes (keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha)	Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data valid untuk laporan kinerja
	T13 : Mekanisma penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes	Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data valid untuk pembagian keuntungan
	T14: Mekanisma monitoring dan evaluasi	Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai pendukung monitoring dan evaluasi
	T16 : Laporan keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh public	Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data yang menjadi informasi keuangan public bagi masyarakat desa
<b>Akuntabel</b>	A20: Laporan keuangan BUMDes secara berkala	Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data pendukung laporan keuangan berkala
	A22 Verifikasi laporan keuangan BUMDes oleh pengawas	Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai verifikator laporan keuangan
<b>Kooperatif</b>	K3 Mekanisma pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat	QR Money mmeberikan data valid sebaai bentuk tanggungjawab social kepada masyarakat
<b>Partisipatif</b>	P3 Mekanisma partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha	QR Money mmeberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut sert amengembangkan BUMDes
<b>Emansipatif</b>	E3 Memberikan pelayanan setara wajar terhadap pihak manapun	QR Money memberikan pelayanan terstandar kepada pihak manapun
<b>Sustainable</b>	S3 Cara (upaya) menghindari conflict of interest	QR Money menjadi salah satu solusi alternative menghindari konflik kepentingan

Sumber : Harjanti Widiastuti dkk (2019) dengan penyesuaian

Dari Indikator Tata Kelola BUMDes yang ada pada Tabel 2, dibangun Instrumen Survey untuk mengukur keberhasilan kegiatan PKM sebagaimana dalam Tabel 3

**Tabel 3** Instrumen Survey

Deskripsi Indikator	Pertanyaan	Jawaban
Pengurus BUMDes dapat menggunakan QR Money untuk mengelola transaksi-transaksi seluruh bidang usaha	Tahukah anda jika QR Money dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola seluruh transaksi usaha di BUMDes?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data valid untuk laporan kinerja	Tahukah anda jika QR Money dapat dimanfaatkan sebagai sumber data valid untuk laporan kinerja?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data valid untuk pembagian keuntungan	Tahukah anda jika QR Money dapat dimanfaatkan sebagai sumber data valid untuk pembagian keuntungan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai pendukung monitoring	Tahukah anda jika QR Money dapat dimanfaatkan sebagai pendukung	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

dan evaluasi	monitoring dan evaluasi?	
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data yang menjadi informasi keuangan public bagi masyarakat desa	Tahukah anda jika QR Money dapat dimanfaatkan sebagai sumber data yang menjadi informasi keuangan public bagi masyarakat desa?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data pendukung laporan keuangan berkala	Tahukah anda jika QR Money dapat dimanfaatkan sebagai sumber data pendukung laporan keuangan berkala?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai verifikator laporan keuangan	Tahukah anda jika QR Money dapat dimanfaatkan sebagai verifikator laporan keuangan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
QR Money memberikan data valid sebagai bentuk tanggungjawab social kepada masyarakat	Tahukah anda jika QR Money dapat memberikan data valid sebagai bentuk tanggungjawab social kepada masyarakat?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
QR Money memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta mengembangkan BUMDes	Tahukah anda jika QR Money dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta mengembangkan BUMDes?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
QR Money memberikan pelayanan terstandar kepada pihak manapun	Tahukah anda jika QR Money dapat memberikan pelayanan terstandar kepada pihak manapun?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
QR Money menjadi salah satu solusi alternative menghindari konflik kepentingan	Tahukah anda jika QR Money menjadi salah satu solusi alternative menghindari konflik kepentingan?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan kegiatan penyuluhan melalui metode ceramah dan tanya jawab, dilakukan survey awal untuk mengukur tingkat literasi pengurus dan anggota BUMDes terhadap tata kelola keuangan dan pemanfaat teknologi QR Money sebagai basis utama transaksi BUMDes

Survey awal yang dilakukan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Anggota BUMDes terkait pemanfaatan QR Money sesuai dengan indikator tata kelola BUMDes, menunjukan bahwa pemahaman sekitar 28,7% dan 71,3% dari jumlah Pengurus dan Anggota belum memahami, sebagaimana dalam Gambar 3



**Gambar 3** Pengukuran **Sebelum** PKM

Setelah pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui metode Tanya jawab dan Simulasi, maka tingkat pemahaman meningkat sekitar 58,8%, sebagaimana dalam Gambar 4 .



**Gambar 4** Pengukuran **Setelah** PKM

Target dari pelaksanaan PKM ini adalah tercapainya indikator-indikator yang telah diseusikan dengan kebutuhan sebagaimana pemetaan indikator dan deskripsi indikator Tata Kelola BUMDes dalam Tabel 4.

**Tabel 4.**Tabel Capaian Indikator Tata Kelola BUMDes

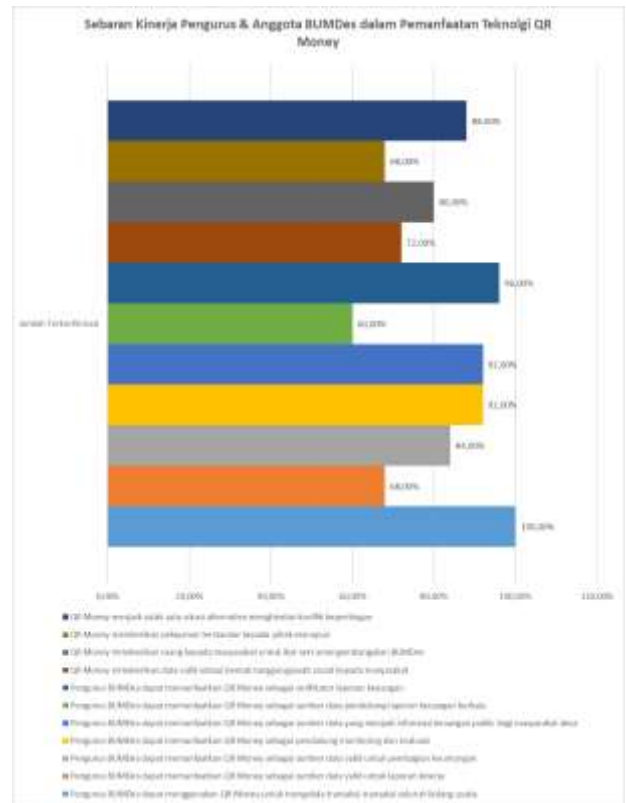
Luaran	Target	Capaian
Pengurus BUMDes dapat menggunakan QR Money untuk mengelola transaksi-transaksi seluruh bidang usaha	100%	100,00%
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data valid untuk laporan kinerja	100%	68,00%
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data valid untuk pembagian keuntungan	100%	84,00%
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai pendukung monitoring dan evaluasi	75%	92,00%
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data yang menjadi informasi keuangan public bagi masyarakat desa	75%	92,00%
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai sumber data pendukung laporan keuangan berkala	75%	60,00%
Pengurus BUMDes dapat memanfaatkan QR Money sebagai verifikator laporan keuangan	75%	96,00%
QR Money mmeberikan data valid sebaai bentuk tanggungjawab social kepada masyarakat	75%	72,00%
QR Money mmeberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut sert amengembangkan BUMDes	75%	80,00%
QR Money memberikan pelayanan terstandar kepada pihak manapun	100%	68,00%
QR Money menjadi salah satu solusi alternative menghindari konflik kepentingan	75%	88,00%

**Tabel 5.** Kondisi sebelum dan sesudah PKM

Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Minimnya literasi pengetahuan dan keterampilan serta pemanfaatan teknologi informasi tata kelola keuangan dan sumber pendapatan	Pengetahuan dan keterampilan meningkat sekitar 58,8% dari 28,7% menjadi 87,5%
Transaksi yang masih menggunakan “ <i>fresh money</i> ”, memiliki celah kebocoran pendapatan dalam aliran kas BUMDes	Setiap transaksi di BUMDes Bina Bersama telah menggunakan QR Money

Analisis menunjukan bahwa Kinerja Pengurus dan Anggota BUMDes dalam memanfaatkan QR Money telah memenuhi 6 indikator capaian. Satu indikator memenuhi target dan 5 melampaui target. Sementara ada 5 indikator yang belum mencapai target. Rata-rata capaian seluruh indikator adalah 81,82%. Indikator-indikator yang belum tercapai dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kebijakan Kepala Desa terhadap tata kelola transaksi keuangan BUMDes dan literasi masyarakat terhadap teknologi dalam kaitan tata kelola BUMDes

Secara Grafik, capaian per indikator secara detail dapat dilihat dalam Gambar 5. Setelah dilakukan rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada BUMDes Bina Bersama Desa, perbandingan kondisi pengurus dan anggota BUMDes sebelum dan sesudah kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 5. Aktifitas selama dilakukannya kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 6



**Gambar 5** Sebaran Kinerja Pengurus & Anggota BUMDes dalam Pemanfaatan Teknolgi QR Money

**Tabel 5.** Kondisi sebelum dan sesudah PKM

Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Minimnya literasi pengetahuan dan keterampilan serta pemanfaatan teknologi informasi tata kelola keuangan dan sumber pendapatan	Pengetahuan dan keterampilan meningkat sekitar 58,8% dari 28,7% menjadi 87,5%
Transaksi yang masih menggunakan “fresh money”, memiliki celah kebocoran pendapatan dalam aliran kas BUMDes	Setiap transaksi di BUMDes Bina Bersama telah menggunakan QR Money

**Tabel 6.** Dokumentasi Kegiatan

Kegiatan	Foto Dokumentasi
Ceramah dan Tanya Jawab	



	
<p>Simulasi dan Tanya Jawab</p>	
<p>Materi Simulasi</p>	

## 5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tata kelola keuangan dan sumber pendapatan BUMDes dengan memanfaatkan Teknologi QR Money, sebagian besar memperoleh capaian yang optimal.

1. Adanya peningkatan pemahaman pengurus dan anggota BUMDes terhadap

pemanfaatan QR Money sebesar sekitar 58,8%, dari sebelum dilakukan kegiatan PKM adalah 28,7% menjadi 87,5 setelah dilaksanakan PKM

2. Rerata capaian indikator Tata Kelola BUMDes yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sebesar 81,82% menunjukkan bahwa PKM memberikan kontribusi optimal

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Teknologi QR Money belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data valid dalam pembagian keuntungan, laporan keuangan berkala serta belum menjadi bentuk tanggung jawab social kepada masyarakat dan belum menjadi pelayanan tersandar badi BUMDes

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor, Universitas Kuningan, Kepala LPPM Universtas Kuningan, Kepala Desa Bojongnegara, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Direktur dan Sekretaris BUMDes Bina Bersama Bojongnegara, Tim PKM dan phak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu

## 7. REFERENSI

- [1] Anggraeni, M. (2016). *Kesejahteraan masyarakat pedesaan. Modus*, 28(2), 155–167
- [2] Fitriana, R. L., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). *Pengelolaan dana: Sisi akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa. In Konferensi Regional Akuntansi V* (pp. 1–29)
- [3] Widiastuti, H., Putra, W.M., Utami, R.U., Suryanto, R. (2019). *Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 22 No. 2 Oktober 2019, 257 – 288
- [4] Krombholz, K., Frühwirt, P., Kieseberg, P., Kapsalis, I., Huber, M., Weippl, E. (2014). *QR Code Security: A Survey of Attacks and Challenges for Usable Security*, Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust, Volume 8533 ISBN : 978-3-319-07619-5
- [5] Mayanti, R. (2022). *Preferensi Masyarakat Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard Sebagai Sarana Teknologi Pembayaran Digital*, Faktor Exacta. Vol. 15, No. 1, pp. 65~72